



# Tujuh Rumah Dinas Disegel



“ Linda Purnama  
Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar

Hingga 2019, kami telah menyelamatkan tujuh rumah dari belasan rumah dinas yang sebelumnya sempat berpolemik karena harus melalui proses sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Penertiban Aset Pemprov Kalbar

**PONTIANAK, SP** - Tujuh rumah dinas, aset Pemerintah Provinsi Kalbar, disegel oleh Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalbar, Kamis (3/9). Sebagian rumah dinas tersebut masih ditempati pejabat lama.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar, Linda Purnama mengatakan bahwa penertiban aset rumah dinas ini sesuai dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hingga 2019, kami telah menyelamatkan tujuh

rumah dari belasan rumah dinas yang sebelumnya sempat berpolemik karena harus melalui proses sidang di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata Linda.

Setelah keputusan PTUN inkrah, maka ketujuh rumah dinas itu baru dapat disegel.

“Target kita tahun 2020 ini bisa selesai semua,” tuturnya.

Dalam proses penyegelan pun, Biro Pengelolaan Aset Kalbar mengikuti

prosedur atau aturan yang ada. Misalnya penyegelan rumah dinas tenaga kerja dan transmigrasi (nakertrans), sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah memberikan surat peringatan untuk mengembalikan kunci rumah.

“Kami sudah menyurati dan protapnya sudah sekian kali kami lakukan. Dan ada pejabat yang minta waktu enam bulan untuk memindahkan barang ke rumah pribadi sambil me-

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ **tujuh rumah**

rehab rumah pribadinya,” katanya.

“Tapi, ketika jangka waktu yang disepakati berlalu, beliau malah mem-PTUN-kan kami, sehingga berproseslah di pengadilan dan sekarang sudah inkrah dan sudah di menangkan oleh pihak Pemprov, tinggal eksekusi saja,” katanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, meski telah disurati dan diinformasikan hasil PTUN telah inkrah, mantan Kadis-

nakertrans yang menjabat sekitar sepuluh tahun lalu itu masih menempati rumah tersebut.

“Putusan ini juga sudah diinformasikan kepada pihak yang menempati rumah dinas dan beliau sudah tahu karena putusannya juga sudah keluar,” jelasnya.

Sebelumnya, Linda menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan penyegehan rumah dinas

di Kota Singkawang pada Agustus yaitu rumah jabatan nakertrans.

“Itu juga perkara di pengadilan dan inkrah, termasuk juga (rumah dinas) yang ada di (Jalan) Karvin dengan total ada empat rumah,” katanya.

Linda mengatakan bahwa keadaan rumah pejabat untuk anggota dewan di Jalan Karvin sudah tidak layak lagi untuk ditempati, tapi dikerjasamakan pihak ketiga

dari segi pemanfaatan aset supaya lebih punya nilai untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Petugas juga menerbitkan aset Rumah Dinas Bappeda Provinsi di Jalan Apang Semangai, No 33 Pontianak.

Pemprov menolak ketika penghuni mengajukan permohonan kepemilikan pribadi rumah tersebut lantaran aset pemprov terbatas. **(ant/bah)**